

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
INFRASTRUKTUR DI KAMPUNG TENSARAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**PURNAMA ADANI GAYO
NIM. 170802046**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purnama Adani Gayo
NIM : 170802046
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 25 September 1998
Alamat : Mongal, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata yang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2021
Yang menyatakan,



Purnama Adani Gayo
NIM. 170802046

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
INFRASTRUKTUR DI KAMPUNG TENSARAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

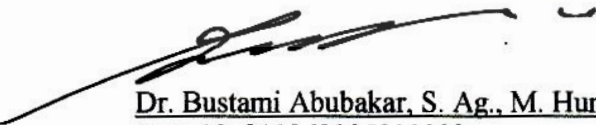
**PURNAMA ADANI GAYO
NIM. 170802046**


**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bustami Abubakar, S. Ag., M. Hum
NIP. 197211262005011002


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc
NIDN. 2007017903

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
INFRASTRUKTUR DI KAMPUNG TENSARAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

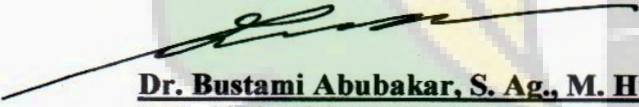
Telah di Uji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/Tanggal: selasa, 04 Januari 2022
2 Jumadil akhir 1443 H

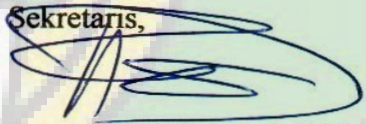
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

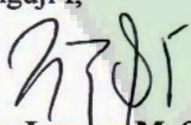
Ketua,


Dr. Bustami Abubakar, S. Ag., M. Hum
NIP. 197211262005011002

Sekretaris,


Renaldi Safriansyah.,S.E.,M.HSc
NIDN. 2007017903

Penguji I,


Eka Januar, M. Soc. Sc
NIP. 198401012015031001

Penguji II,


Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si.
NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan yang baik merupakan salah satu proses dalam pengembangan desa yang memberikan peran besar bagi kemajuan kampung. Untuk melaksanakan pembangunan yang baik tentunya membutuhkan pengelolaan anggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan agar jalannya pembangunan sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat. Dengan adanya manajemen pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan Kampung Tensaran dapat lebih meningkatkan pembangunan berdasarkan kepentingan kampung dan kemauan masyarakat Kampung Tensaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan dana desa pada Kampung Tensaran pada tiap periode tahun berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di kampung Tensaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa dana desa harus dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban, sehingga memberikan manajemen yang efektif dalam pengelolaan dana desa yang mampu memberikan kesesuaian kinerja pembangunan yang efektif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Kampung Tensaran sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat kampung tersebut mengalami perubahan dan perbaikan pada tiap tahunnya, walaupun dalam kegiatan pembangunan masih mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sebuah kewajaran yang terjadi dalam suatu daerah.

Kata Kunci : *Pengelolaan, dana desa, pembangunan infrastruktur.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana desa dalam Meningkatkan Infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah”.Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang ikut membantu peneliti sampai selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin., AK. MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Eka Januar, M.Soc., Sc, Selaku Ketua Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rasa hormat dan terima kasih kepada Dr. Bustami Abubakar, S. Ag., M. Hum dan Renaldi Safriansyah,S.E.,M.HSc. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran, dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah yang telah menyediakan bahan dalam penelitian ini.
7. Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, mendidik, membimbing, serta selalu memberi doa yang tulus, motivasi dan semangat pengorbanan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Kakak saya Rosita Adani Gayo dan adik saya Mahrani Adani Gayo yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan peneliti dan selalu memberikan cinta terbaik untuk peneliti.
10. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri kepada Nya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi banyak pihak dan semoga kita semua mendapatkan manfaatnya, Aamiin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 20 Desember 2021
Penulis,

Purnama Adani Gayo



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Penjelasan Istilah	5
1.7. Metode Penelitian	7
1.7.1 Pendekatan Penelitian	7
1.7.2 Fokus Penelitian.....	8
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	8
1.7.4 Sumber dan Jenis Data.....	9
1.7.5 Informan Penelitian.....	10
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.7.7 Teknik Keabsahan Data	13
1.7.8 Teknik Analisis Data	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kerangka Konseptual	16
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	16
2.2.2 Pengelolaan Dana Desa	18
2.2.3 Tujuan Dana Desa.....	21
2.2.4 Dasar Hukum Dana Desa.....	22
2.3 Teori Pembangunan Infrastruktur	22
2.4 Kerangka Berfikir.....	24
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
3.1 Gambaran Umum Kampung Tensaran.....	25
3.1.1 Sejarah Kampung Tensaran	25
3.1.2 Sejarah Pemerintahan Kampung Tensaran	25
3.1.3 Kondisi Kampung Tensaran	26

3.1.4	Struktur Pemerintahan Kampung Tensaran.....	27
3.1.5	Geografis Kampung Tensaran	27
3.1.6	Demografi dan Kependudukan Kampung Tensaran.....	28
3.2	Pembangunan Kampung Tensaran.....	29
BAB IV : DATA DAN HASIL PENELITIAN		30
4.1	Pengelolaan Dana Desa dalam PeningkatanInfrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten AcehTengah.....	30
4.1.1	Penerimaan Dana Desa pada Tahun 2016-2020	31
4.1.2	Pengelolaan Dana Desa di Kampung Tensaran.....	32
4.1.3	Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tensaran	39
4.1.4	Belanja Pembangunan Infrastruktur Kampung Tensaran Tahun 2020	48
4.1.5	Analisa Pengelolaan Dana Desa Pembangunan Kampung Tensaran.....	54
4.2	Faktor pendukung dan penghambat Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.....	56
4.2.1	Faktor Pendukung.....	56
4.2.2	Faktor Penghambat	59
BAB V PENUTUP		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Informan Penelitian.....	11
Tabel 3.1 : Sejarah Pemerintahan Kampung Tensaran.....	26
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Kampung Tensaran.....	28
Tabel 3.3 : Kondisi Fisik Kampung Tensaran.....	28
Tabel 4.1 : Analisa Pengelolaan Dana Desa Pembangunan Kampung Tensaran.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Struktur Pemerintahan Kampung Tensaran.....	27
Gambar 4.1	: Pembangunan Fisik Rabat Kampung Tensaran.....	44
Gambar 4.2	: Transparansi Pengelolaan Dana Desa	59
Gambar 4.3	: Pembangunan pada Dusun Burmine	61
Gambar 4.4	: Pembangunan Dusun Burbiah	62



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Penerimaan Dana Pembangunan Kampung Tensaran 2016-2020	31
Grafik 4.2 : Anggaran Dana Desa 2016-2020.....	42
Grafik 4.3 : Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020	49
Grafik 4.4 : Pembangunan Fisik dan Non Fisik.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidak terlepas dari nilai sistem administrasi yang memiliki arah dan tujuan yang telah direncanakan, karena pembangunan merupakan agen perubahan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian dalam nilai pembangunan harus ada sebuah perubahan untuk memiliki nilai peningkatan sebagai proses pelaksanaan penyelenggaraan proses administrasi.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, kebijakan untuk mempermudah jalannya organisasi dalam peningkatan pembangunan di setiap daerah atau pedesaan.

Sebuah pembangunan pada setiap daerah harus memiliki teknis pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang berpengaruh dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pedesaan juga merupakan suatu program pembangunan yang dilakukan secara terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, maupun perumahan.¹

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan kondisi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

¹Zuhaqiqi, “*Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*”, Skripsi, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

²Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Kampung Tensaran terletak di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Tensaran ini dulunya termasuk kampung terpencil Kecamatan Bebesen. Dahulu, banyak masyarakat mengeluh bahwa di Kampung Tensaran kurangnya pelaksanaan pembangunan yang memberikan nilai yang kurang memuaskan terhadap masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya alokasi dana desa untuk pembangunan fisik di pemerintahan desanya, mulailah terlihat perkembangan Kampung yang semakin meningkat seperti pembangunan jalan yang telah dilakukan, pembangunan parit, dan pembangunan fisik lainnya. Pemerintah desa dan aparatur desa sangat berperan untuk mengubah Kampung Tensaran yang dulunya sangat tertinggal dan terpencil mulai menjadi Kampung yang maju dan menyetarai kampung-kampung lain yang ada di Kecamatan Bebesen.

Kampung Tensaran merupakan kampung yang belum memiliki peningkatan pembangunan-pembangunan yang diantara Kampung lain yang ada di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Setelah itu adanya pergantian pemerintahan desa kini memiliki kemajuan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas pembangunan, seperti pembangunan jalan, MCK, kantor desa yang baru, taman jalan, air bersih, BUMDES, dan lain sebagainya bagian dari pembangunan Kampung Tensaran.

Selain itu, Kampung Tensaran memiliki prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa, dimana seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan kemauan masyarakat dan seluruh anggaran pembangunan sudah beritahukan di papan pengeluaran pembangunan desa. Anggaran dana desa dalam pembangunan

fisik telah direncanakan dengan baik, dan ini merupakan dampak dari sistem pengelolaan anggaran yang efektif yang berpengaruh penting dalam proses pembangunan Kampung Tensaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah:

1. Melihat bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di Kampung Tensaran Aceh Tengah.
2. Melihat hambatan yang ditemui pemerintah dalam proses pembangunan Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di Kampung Tensaran Aceh Tengah?
2. Apa saja hambatan pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari keseluruhan rumusan yang ada penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di Kampung Tensaran Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan peneliti sendiri sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur desa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintahan desa, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan yang operasional sehingga lebih efektif dan efisien
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa untuk pembangunan mengenai pemanfaatan anggaran dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan dan membantu pemerintahan desa dalam peningkatan pembangunan.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Menurut G.R Terry, pengelolaan merupakan suatu proses yang memiliki ciri khas yang meliputi segala tindakan-tindakan perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan berbagai sumber diantaranya sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴
3. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁵
4. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan

³Muhammad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1.

⁴Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Bpkp, 2015).

⁵Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Nasional- LPU UNAS, 2019) , h. 8.

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.⁶

5. Reje Kampung adalah sebutan untuk kepala desadi Aceh Tengah.
6. Kualitatif merupakan metode penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan metode matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁷
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun.⁸
8. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk di antaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya.⁹

⁶Grigg Neil, *Isfrastructure Engineering and Manajemen*, (John Wiley and Son, 1988), h. 52.

⁷Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), h. 44.

⁸Hera Novita, *Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I Sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 Pada Satuan Kerja di Kewilayahan Polda Jatim*, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 4, No. 10 Oktober 2020.

⁹Risya Novita Sari, Dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No 11.

9. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).¹¹

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik, karena data yang diperoleh dari penelitian ini seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, dan disusun peneliti di lokasi penelitian, serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.”

1.7.2 Fokus penelitian

¹⁰Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Bpkp, 2015).

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.14

NO	Dimensi	Indikator
1.	Pengelolaan dana desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. pertanggungjawaban
2.	Penghambat dan pendukung	a. Internal b. Eksternal

Sumber: PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014

1.7.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan di sini adalah tempat memperoleh sumber data yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Kampung Tensaran beralamat di Kampung Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian Kampung Tensaran Aceh Tengah didasari atas beberapa pertimbangan yaitu di Kampung tersebut terdapat permasalahan yang ingin diteliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa penggunaan anggaran dana desa yang digunakan sepenuhnya untuk pembangunan desa, yang dulunya Kampung Tensaran itu kampung yang masih tertinggal tapi dengan pemanfaatan dana desa yang baik membuat Kampung Tensaran lebih maju.

Kampung Tensaran memiliki daya tarik tersendiri, dikarenakan adanya keterbukaan dari pihak aparat desa terutama kepala desa terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Inilah alasan peneliti ingin melakukan penelitian di salah satu lembaga desa di salah satu Kabupaten Aceh Tengah.

1.7.4 Sumber dan jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data atau informasi yang langsung diberikan kepada peneliti (pengumpul data).¹² Maka dari itu data primer harus dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan informan yang telah ditentukan.
2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari berbagai dokumen yang disediakan oleh Kampung Tensaran Aceh Tengah maupun dari skripsi, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian yang dapat memberikan informasi terkait dengan pengelolaan danadesa dalam peningkatan infrastruktur desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.

1.7.5 Informan Penelitian

Subjek penelitian ini pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud peneliti adalah kepala desa Tensaran Aceh Tengah, Aparatur desa dan masyarakat Kampung Tensaran Aceh Tengah.

Subjek penelitian pertama yang akan diteliti adalah kepala desa. Alasan peneliti menjadikan kepala desa sebagai subjek penelitian adalah karena kepala

¹²Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet), h. 38.

desa sangat berperan dan mempunyai pengaruh besar dalam peningkatan pembangunan melalui penggunaan anggaran dana desa. Subjek penelitian yang kedua adalah aparatur desa, karena aparatur desa yang memanfaatkan dan mengelola dan membantu kepala desa dalam pembangunan desa. Subjek penelitian yang ketiga yaitu masyarakat. Alasan peneliti menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian karena masyarakat yang merasakan langsung dampak dari pembangunan desa tersebut.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan
1	Reje	1 Orang	Reje merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan kampung
2	Aparatur desa (Bendahara, Sekretaris dan kaur pembangunan)	2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Bendara merupakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kampung - Sekretaris merupakan koordinator pelaksana teknik pengelolaan keuangan kampung - Kaur pembangunan merupakan penyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

3	Masyarakat desa yakni : 1 orang Tokoh Agama 1 orang Perwakilan kelompok petani 1 orang Perwakilan kelompok pendidikan 1 orang Perwakilan kelompok miskin 1 masyarakat pengelola BUMK	5 Orang	5 unsur masyarakat ini merupakan perwakilan dalam perencanaan pembangunan.
Jumlah		8 orang	

Sumber: Kampung Tensaran 2021

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

1. Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera yaitu melalui penglihatan.¹³ Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada di lapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian. Dalam observasi, peneliti mengumpulkan informasi tentang pembangunan-pembangunan yang berada di Kampung Tensaran khususnya pada pembangunan infrastruktur.

¹³Suharsimi Arikundo, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 133.

2. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.¹⁴ Wawancara dapat diperoleh dengan mengumpulkandata pembangunan kampung, yang dilakukan untuk menggali informasi tentang pengelolaan dana desadalam meningkatkan infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah di dokumentasikan dalam berbagai bentuk. Ia dapat diartikan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sugiyono menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵Dokumentasi yang dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang berupa buku, undang-undang, jurnal, skripsi, artikel dan dokumen-dokumen tentang pengelolaan dana desadalam meningkatkan insfratruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.

1.7.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian demi velibitas dan reabilitas data yang telah dikumpulkan.Adapun

¹⁴Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2017), h. 37

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), h. 329.

teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu, teknik ini dimaksud untuk mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah digunakan.

1.7.8 Teknis Analisis Data

1. Reduksi data adalah proses dalam penyederhanaan data yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan cara menganalisis dan mengolah data dengan tujuan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat hasil penelitian.
2. Penyajian data yaitu proses yang dilakukan dalam penyusunan informasi menjadi bentuk yang sederhana agar dapat dipahami maknanya. Dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Penarikan kesimpulan adalah langkah dalam melakukan penelitian dengan menafsirkan data secukupnya terhadap data yang telah diolah dengan lengkap dan jelas, dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian sebagai hasil kesimpulan yang valid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di sini, penulis mencantumkan hasil dari kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada kecamatan V koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015).”¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa tersebut, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Faktor-faktor penunjang dan pengahambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Karimah, Shaleh dan Wanuwatie yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung jawaban, dan transparansi yang belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap

¹⁶M. Rinaldi Aulia, “Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman”, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2016).

tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pandeiror, Pioh, dan Kairupan berjudul “Transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infratraktur di desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”, dalam jurnal ilmu pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi tidak konsisten dari pemerintahan desa dan PBD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Walaupun rencana pembangunan dapat diselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi terkait pengelolaan pembangunan desa, sehingga pencapaian tujuan dalam pengelolaan yang dilakukan masih kurang efektif dalam pembangunan desa.¹⁸
4. Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Solichin dan Akmal dengan judul “Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Tolo Kabupaten Seluma), dalam jurnal penelitian sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi gambaran masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya informasi dan transparansi dari pemerintahan desa padahal

¹⁷Faizul Karimah, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 4.(Universitas Brawijaya Malanag, 2013).

¹⁸PriantoTiarPandeiror, dkk, *TransparansiPengelolaan Dana Desadalam Pembangunan Infratraktur di DesaDiatKecamatanLolakKabupatenBolaangMongondow*, Jurnal Jurusan Ilmu pemerintahan, Vol. 1, No. 1. (Universitas Sam Ratulangi, 2018).

transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hampir semua program dan proyek pemerintah mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan program pembangunan akan tetapi partisipasi masyarakat sering disalahgunakan.¹⁹

Penelitian ingin mengetahui pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti ingin mengetahui tata kelola anggaran dana desa di Kampung Tensaran.

2.2 Kerangka Konseptual

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam pasal 1 diterangkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

Menurut Hanif Nurcholis bahwa dana desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan

¹⁹Solichin dan Samsul Akmal, *Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Tolo Kabupaten Seluma)*, dalam Jurnal Penelitian sosial dan Politik. Vol. 7, No. 2, Desember 2018.

²⁰Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban desa tersebut.²¹ Dapat diartikan juga bahwa dana desa adalah segala hal yang berkaitan tentang keuangan desa sebagai pelaksana kewajiban desa dalam memberikan peningkatan dan perubahan bagi desa.

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) dalam penggunaannya yang terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdesa), dengan ini perencanaan program dan kegiatannya harus disusun terlebih dahulu melalui musyawarah dalam perencanaan dan pembangunan desa. Tujuan dari dana desa yaitu untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²²

Fokus penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa, dimana dana desa ini merupakan sumber pemicu pelaksanaan pembangunan diseluruh daerah. Dan dalam pengalokasian dana desa dalam setiap daerah yang diberikan oleh pemerintah biasanya diperhitungkan melalui tingkat kebutuhan ekonomi dan jumlah penduduk desa.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Melayu S.P Hasibuan, pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur dalam proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robin dan Coulter, pengelolaan adalah proses mengoordinasikan

²¹ Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3. No 4 Tahun 2015.

²² Yamulia Hulu, dkk, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10. No. 1 Tahun 2018.

aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain.²³

Menurut Peraturan Menteri No 6 Tahun 2020 pasal 1 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴ Jadi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke APB desa. Dana desa ini digunakan berdasarkan kewenangan dari pemerintah desa atas pengawasan dari pejabat yang berwenang agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap proses peningkatan pembangunan yang efektif, dikarenakan suatu pembangunan harus memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang baik agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam pengelolaan dana desa harus memiliki nilai keterbukaan dan nilai tanggung jawab yang tinggi agar tidak memiliki dampak yang buruk terhadap pembangunan, karena banyak desa yang memiliki nilai pembangunan yang kurang efektif dikarenakan kurangnya manajemen pemerintahan desa yang kurang operasional dalam pengelolaan anggaran.

²³Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 1.

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Pasal1 Ayat 2.

Untuk tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan sebagai berikut:

a. Penganggaran

Penganggaran merupakan sebuah proses dalam gambaran keuangan yang telah direncanakan untuk sebuah kegiatan tertentu.

b. Pengalokasian

Sebuah proses ataupun tahanan yang dilakukan untuk memberikan alokasi dengan perencanaan yang telah ditentukan.

c. Penyaluran

Merupakan proses menyalurkan sesuatu dengan tahapan yang telah di rencanakan.

d. Penanggungjawaban dan pelaporan

Maksudnya dalam setiap bentuk pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Sedangkan pelaporan adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa yang dikelola dan disampaikan oleh pemerintahan desa kepada BPD, Pengawas dan masyarakat.²⁵

Dalam tahapan ini maksudnya adalah memberikan penilaian terhadap sebuah kegiatan yang telah dibuat sebagai proses peningkatan kinerja agar menjadi lebih efektif, nantinya dana desa utamanya digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur untuk kemajuan desa.

²⁵Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Pemerintahan, Vol. 3, No 4, Tahun 2015.

2.1.3 Tujuan Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Tujuan alokasi dana desa yaitu:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Menurut pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.²⁶

2.1.4. Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang “dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

²⁶Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

3. Peraturan Menteri desa Nomor 5 Tahun pasal 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.²⁷

2.3 Teori Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi demitercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari Suatu bangsa dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.²⁸

Pembangunan juga merupakan suatu unsur peningkatan yang memberikan perubahan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembangunan harus dibantu oleh pemerintah sebagai pengoordinasian pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pembangunan desa adalah sebuah kegiatan pembangunan di kampung yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Tujuannya ialah memberikan

²⁷Endang Juliana, *“Efektivitas Pemanfaatan Dana desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan,” Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 21.

²⁸Mardikanto, *Redefinisi dan Revitabilitas Penyuluhan Pembangunan dalam Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2009), h. 105.

perubahan untuk memiliki pengembangan di desa berdasarkan perencanaan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Grigg infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.²⁹ Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa, dikarenakan adanya peningkatan dalam pengembangan desa.

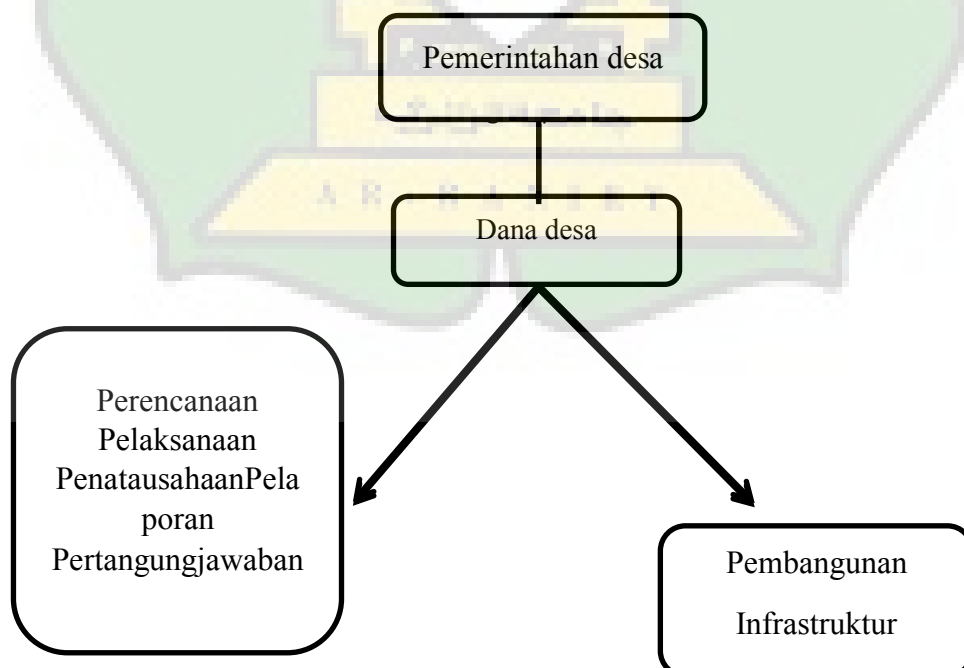
Pembangunan Infrastruktur desa mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional.³⁰

²⁹Adam Latif, dkk, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 1, Februari 2019.

³⁰Tifani Ardilah, dkk, *Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, h. 73.

2.4 Kerangka berfikir

Dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan bagi setiap daerah sebagai bentuk pengembangan ekonomi maupun sosial masyarakat. Maka dari itu, dalam proses penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah, pemerintahan desa harus mampu mengelola dana desa secara efektif yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena sering dijumpai pembangunan infrastruktur yang tidak tepat dan tergolong kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, dikarenakan lemahnya pengelolaan dana desa dan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa harus dikelola dengan efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan beberapa teori maka digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai alur berfikir penulis dalam penelitian ini:



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kampung Tensaran

3.1.1 Sejarah Kampung Tensaran

Kampung Tensaran merupakan kampung yang berbatasan dengan Kampung Daling dengan ditandai adanya alur sampai ke tingkat yang sekarang disebut Kampung Bahgie. Di kampung ini terdapat air terjun yang dijuluki dengan sebutan Tetajur Simen yang artinya *air yang mengenang*. Akibat jatuhnya air tersebut dinamakan *Tensaran*. Oleh karena itu kesepakatan Reje/Kepala desa Abu dengan Pulu Linge, pemekaran Kampung Daling menjadi kampung baru diberi nama dengan Kampung Tensaran dan air terjun tersebut menjadi batas kampung hingga saat ini semenjak tahun 1947.

3.1.2 Sejarah Pemerintahan Kampung Tensaran

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suatu kampung tentunya harus memiliki seorang pemimpin atau disebut Kepala Kampung. Kepala Kampung memiliki tugas-tugas seperti menyelenggarakan pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan Kampung, dan pembinaan kemasyarakatan Kampung.

Pemerintahan Kampung Tensaran sudah mengalami 12 pergantian Kepala Kampung sejak tahun 1947 sampai 2021. Berikut merupakan struktur pemerintahan Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.1 Sejarah Pemerintahan Kampung Tensaran

No	Nama Reje/Kepala Desa	Periode
1	Reje Abu	1947 – 1953
2	M. Amin Bidin	1953 – 1958
3	M. Amin	1958 – 1960
4	A. Abu Tari	1960 – 1970
5	Hasri A. Deka	1970 – 1975
6	Abd. Muthalib	1975 – 1997
7	Harun	1997 – 2000
8	M. Yusuf Harun	2000 – 2005
9	Rahmuddin	2005 – 2007
10	Amran	2007 – 2013
11	Ibrahim	2013 – 2019
12	Hamidi	2019– Sekarang

Sumber data: Profil Kampung Tensaran

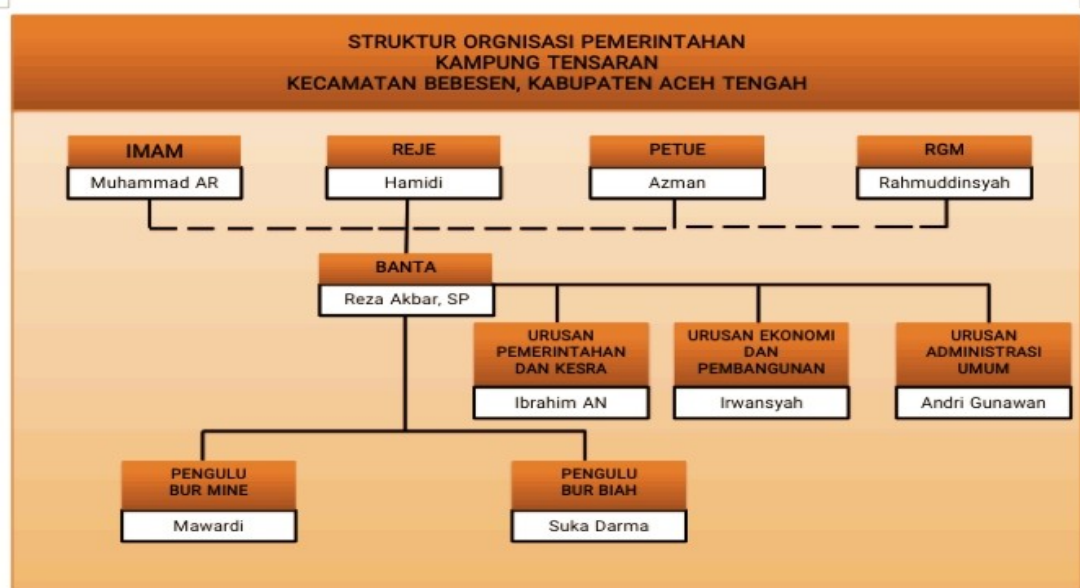
3.1.3 Kondisi Kampung Tensaran

Penyebaran kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tengah tersebar di daerah dengan topografi perbukitan, dengan ketinggian diatas permukaan laut (DPL) 200 -2600 M dan bersuhu dingin serta daerah bercurah hujan tinggi. Kampung Tensaran merupakan salah satu kampung yang terletak di daerah perbukitan seperti tersebut di atas. Kampung ini juga merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Kabupaten Aceh Tengah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi.

3.1.4 Struktur Pemerintahan Kampung Tensaran

Setiap lembaga pemerintahan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada. Adapun struktur organisasi pemerintahan Kampung Tensaran adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kampung Tensaran



Sumber: Profil Kampung Tensaran

3.1.5 Geografis Kampung Tensaran

Keadaan Geografis Kampung Tensaran hampir sama dengan kebanyakan kampung lain merupakan daerah perbukitan, dengan beriklim tropis (dua musim) yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mayoritas lahan yang dimiliki kampung dimanfaatkan sebagai area perkebunan kopi sebagai andalan utama bagi penghasilan ekonomi masyarakat. Berikut adalah letak geografis Kampung Tensaran:

- a. Sebelah Utara : Kampung Daling
- b. Sebelah Timur : Kampung Bahgie
- c. Sebelah Selatan : Kampung Lelabu
- d. Sebelah Barat : Kampung Pantan Sile

3.1.6 Demografi dan Kependudukan Kampung Tensaran

Sebaran penduduk Kampung Tensaran terbagi menjadi 2 dusun, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun/pengulu yang berfungsi sebagai Perwakilan Reje/Kepala Desa. Adapun 2 Dusun tersebut adalah Dusun Burmine dan Dusun Burbiah dengan total penduduk mencapai 569 jiwa dan memiliki lahan 420 Ha. Berikut adalah beberapa tabel informasi tentang Kampung Tensaran:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kampung Tensaran

Jumlah Penduduk Kampung Tensaran		
No.	Penduduk Dusun	Jumlah
1	Dusun Burbiah	222 Jiwa
2	Dusun Burmine	347 Jiwa
Jumlah		569 Jiwa

Sumber data: Profil Kampung Tensaran Tahun 2020

Tabel 3.3 Kondisi Fisik Kampung Tensaran

No	Pemanfaatan Lahan	Volume
1	Pemukiman	50 Ha
2	Perkebunan	100 Ha
3	Pertanian	200 Ha

4	Wisata dan olah raga	10 Ha
5	Rawa	5 Ha
6	Saluran Irigasi	1 Ha
7	Jalan	700 Mt
8	Jembatan dan gorong-gorong	12 Tittp
Total Area Kampung		420 Ha

Sumber data: Profil Kampung Tensaran Tahun 2020

3.2 Pembangunan Kampung Tensaran

Dalam pembangunan Kampung Tensaran memiliki peningkatan yang signifikan yang terlihat pada tahun 2016-2020, dimana dalam hal pembangunan sudah mulai terlihat perkembangan pembangunan infrastruktur pada tahun 2016-2020. Kampung Tensaran sudah memiliki pembangunan fisik yang baik, dimana jika dilihat kampung tersebut sudah adanya perbaikan jalan, dimana memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, karena Kampung Tensaran merupakan wilayah dalam mayoritas pertanian, jadi masyarakat sangat membutuhkan jalan yang bagus sebagai pengangkut hasil pencarian mereka. Dan juga terlihat perkembangan lainnya seperti pembangunan MCK, drainase, taman jalan, air bersih.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran danadesa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan amanah UU Nomor 6 Pasal 72 Ayat 2 tahun 2014 yaitu salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).³¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 2 Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang biayai oleh dana desa.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.

³¹Hizkia Victor, Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrument Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, h. 15.

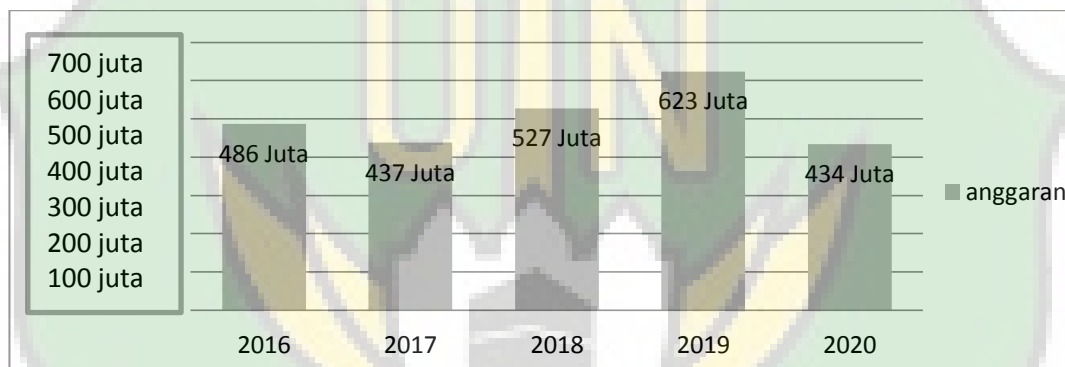
- c. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.³²

4.1.1 Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2020

Berikut merupakan penerimaan anggaran dana desa yang telah dialokasikan pada Kampung Tensaran Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Pada Bidang Pembangunan pada tahun 2016-2020:

Grafik 4.1

Penerimaan Dana Desa dalam Pembangunan Kampung Tensaran 2016-2020



Sumber: Kampung Tensaran (2021)

Penerimaan Dana Desa (PDD) tahun 2020 menurun sebesar Rp.189 juta dibandingkan dengan penerimaan dana desa tahun 2019. Dalam 5 tahun terakhir dana kampung memiliki dana desa rata-rata Rp. 500 juta, penurunan penerimaan dana desa pada tahun 2020 pada pembangunan fisik diakibatkan karena adanya Covid 19 yang mengakibatkan dana dipakai sebagai peningkatan kesehatan masyarakat seperti memberikan bantuan tunai/non tunai, serta memberikan kegiatan pelatihan dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

³²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.

4.1.2 Pengelolaan Dana Desa di Kampung Tensaran

Menurut Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1 menjelaskan bahwa alokasi dana desa adalah “dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.” Sedangkan menurut Peraturan Bupati Aceh Tengah No 60 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dana desa adalah “Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”³³Tujuannya ialah untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan kampung dalam menyusun program kegiatan yang dibiayai dengan dana desa dan juga sebagai penyusunan program kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sinergis sesuai dengan arah dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

Penyaluran dana desa kepada kampung harus diringi dengan kewajiban pelaksanaan pembangunan secara transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan secara transparan maksudnya adalah menggunakan anggaran secara lebih terbuka kepada masyarakat dengan memberikan suatu pendataan dalam pengeluaran dan pemasukan dari penggunaan anggaran dana desa. Sedangkan dalam pelaksanaan

³³Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1.

pembangunan yang akuntabel maksudnya adalah suatu kewajiban pemerintahan desa dalam memberikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa mengenai kesesuaian prosedur pelaksanaan dan pengelolaan dana desa terhadap kebijakan dan peraturan pemerintahan yang berlaku.

Dalam pengalokasian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki fungsi utama bagi kampung untuk mampu mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan kampung. Pengalokasian dana desa seharusnya memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang efektif agar tidak disalahgunakan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, kampung harus memiliki struktur organisasi dalam tingkat manajemen yang operasional dalam mengatur keuangan desa yang transparan untuk kemajuan kampung.

Jika kita melihat Kampung Tensaran pada tahun-tahun sebelumnya, Kampung ini terindikasi kurang efektif dalam pengelolaan dana desa, Tetapi setelah adanya pergantian aparatur desa, mulai terlihat pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, dikarenakan adanya pengembangan dalam pembangunan desa dan partisipasi masyarakat sendiri yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa harus dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban.³⁴ Keuangan desa dikelola dengan baik sesuai dengan sistem peraturan pemerintah,

³⁴Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

karena pengelolaan anggaran yang baik merupakan simbol peningkatan pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa:

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara terencana untuk mendapatkan tujuan pelaksanaan pengelolaan dana, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pembangunan kampung secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Kampung, ditetapkan pelantikan reje kampung. RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah kampung pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM kampung memuat visi dan misi Reje Kampung, arah kebijakan pembangunan kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung,
- b. Rencana pembangunan tahunan kampung atau yang disebut rencana rencana kerja pemerintahan kampung (RKP Kampung), pelaksanaan pembangunan kampung, merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemerintahan Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM kampung.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan Kampung Tensaran juga sudah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dijadikan sebagai program perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan pemerintahan.

Seorang informan Reje Kampung memaparkan mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan Kampung Tensaran:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami melaksanakan musrenbang setiap tahun untuk menentukan prioritas tiap tahunnya, dan di sini Reje Kampung Tensaran memiliki RPJM dalam merencanakan pembangunan, dimana seluruh aparat desa dan masyarakat ikut serta dalam merencanakan pembangunan, yang biasanya kepala dusun diberikan arahan untuk pembangunan apa saja yang akan dibangun dalam setiap dusunnya.”³⁵

Bendahara Kampung Tensaran dalam perencanaan pembangunan Kampung Tensaran:

“Setiap pembangunan yang ingin dibangun Kampung Tensaran ini berdasarkan dari kemauan dan kepentingan masyarakat yang akan dibangun setelah adanya musyawarah desa.”³⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran memiliki pola pengelolaan berdasarkan musyawarah, dimana memiliki tujuan untuk memberikan peningkatan pembangunan secara terencana dan lebih terperinci agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dimusyawarahkan.

³⁵Wawancara dengan Reje Kampung Tensaran, Jam 11.00 Tanggal 25 Juni 2021.

³⁶Wawancara dengan Bendahara Kampung Tensaran, Jam 09.00 Tanggal 25 Juni 2021.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan oleh reje, dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung ditetapkan dengan keputusan reje, dan PTPKK berasal dari unsur perangkat kampung yaitu banta/sekretaris, kaur urusan, bendahara. Dalam pelaksanaan pembangunan kaur pembangunan memiliki tugas sebagai menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan kampung yang telah ditetapkan didalam APBKampung, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada reje dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran melalui surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada reje dan diverikasi oleh banta.

c. Penatausahaan

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan kampung dilakukan oleh bendahara kampung, dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur, melakukan penutupan kas setiap akhir bulan dan menuangkan dalam suatu berita acara penutupan kas, dan wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban,

Dalam penatausahaan pembangunan Kampung Tensaran bendahara memiliki tugas dalam pendataan pengeluaran dan pemasukan, karena dalam akhir kegiatan pembangunan kampung harus memiliki laporan yang jelas sesuai pedoman yang telah dibuat dalam RPJM kampung.

Seorang informan Bendahara Kampung Tensaran memaparkan hasil wawancara dalam penatausahaan pelaksanaan pembangunan Kampung Tensaran:

“Dalam rangka penatausahaan, mendata seluruh pengeluaran dan pemasukan untuk dibuat laporan pembangunan. Data dalam laporan harus jelas karena akan dilaporkan.”³⁷

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam segala kegiatan pembangunan harus memiliki penatausahaan pembangunan yang baik, penatausahaan dikategorikan dalam pengawasan pembangunan. Disini pemerintahan harus memiliki manajemen dalam mengawasi kegiatan dan juga mendata kas keluar/masuk untuk keperluan pembangunan kampung, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memberikan pengawasan pembangunan.

d. Pelaporan

Dalam pelaporan, kaur pembangunan membuat dokumen kwitansi/laporan kegiatan yang akan diserahkan kepada Banta/Sekdes untuk disusun menjadi LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). Dalam pelaporan dana desa, reje menyampaikan

³⁷Wawancara dengan Bendahara Kampung Tensaran, Jam 11.00 Tanggal 25 Juni 2021

laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.

Reje Kampung Tensaran memaparkan dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan:

“Iya, setiap pembangunan yang telah dilaksanakan harus dibuat SPJ dalam rangka memberikan keterbukaan dalam penggunaan anggaran dana desa untuk apa saja yang telah dipakai. Dalam SPJ harus sesuai dengan aktivitas kegiatan, karena jika salah akan tidak diterima oleh pihak yang berwenang. maka akan menjadikan masalah bagi kampung.”³⁸

Hal demikian juga disampaikan oleh kaur pembangunan Kampung Tensaran:

“ dalam akhir pelaksanaan kami membuat laporan pertanggungjawaban

dua kali dalam 1 tahun, yaitu semester 1 dan semester akhir dan mulai tahun 2018 kabupaten aceh tengah dalam pelaporan keuangan sudah menggunakan melalui aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)”³⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dalam setiap kegiatan pembangunan harus memiliki LPJ, karena LPJ adalah hal yang tidak bisa terlepas dari segala kegiatan dalam pembangunan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa. Sebagai pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam membuat SPJ harus sesuai dengan dengan DPA yang telah dibuat agar sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

e. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa reje menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada bupati setiap akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan

³⁸Wawancara dengan RejeKampung Tensaran, Jam 10.00 Tanggal 25 juni 2021

³⁹Wawancara Dengan Kaur Pembangunan, jam 9.00 tanggal 7 januari 2022

pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung ditetapkan dengan peraturan kampung. Peraturan kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung terdiri dari laporan realisasi semester 1 dan laporan realisasi semester akhir, laporan penyerapan dan capaian output tahap 1 dan laporan penyerapan dan capaian output tahap II (khusus dana kampung yang bersumber dari APBN).

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pembangunan disampaikan kepada bupati melalui camat dengan tembusan pada dinas pemberdayaan masyarakat. Dan laporan tersebut paling lambat diserahkan paling lama pada 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berikut merupakan wawancara terhadap Kaur pembangunan mengenai pertanggungjawaban:

“Dalam pertanggungjawaban reje melaporkan kegiatan kepada masyarakat pada tiap tahun berjalan, anggaran kegiatan dilaporkan dalam bentuk musyawarah terhadap masyarakat.

4.1.3 Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kampung Tensaran Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardesa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan memiliki nilai transparan, keadilan dan kejujuran sebagai bentuk transparansi dalam

pengelolaan dana desa. Undang-undang No 11 tahun 2016 pasal 1 telah dijelaskan bahwa dana desa adalah seluruh dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban hak dan kewajiban desa.

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam undang-undang disini sudah dijelaskan bahwa pemerintahan desa memiliki wewenang untuk membangun daerah dengan anggaran yang telah diberikan untuk memberikan peningkatan dan pengembangan bagi kampung.

Menurut Soemantri dalam Andri Munawar bahwa persentase penggunaan alokasi dana desa ditetapkan sebanyak 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa.
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu.
- c. Peningkatan pendidikan dasar.
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan.
- f. Pemberdayaan sumberdaya aparatur desa.

- g. Menjaga kegiatan pelaksanaan 10 program PKK.
- h. Kegiatan perlombaan desa.
- i. Penyelenggaraan musyawarah desa
- j. Kegiatan bulan bakti gotong royong
- k. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga.

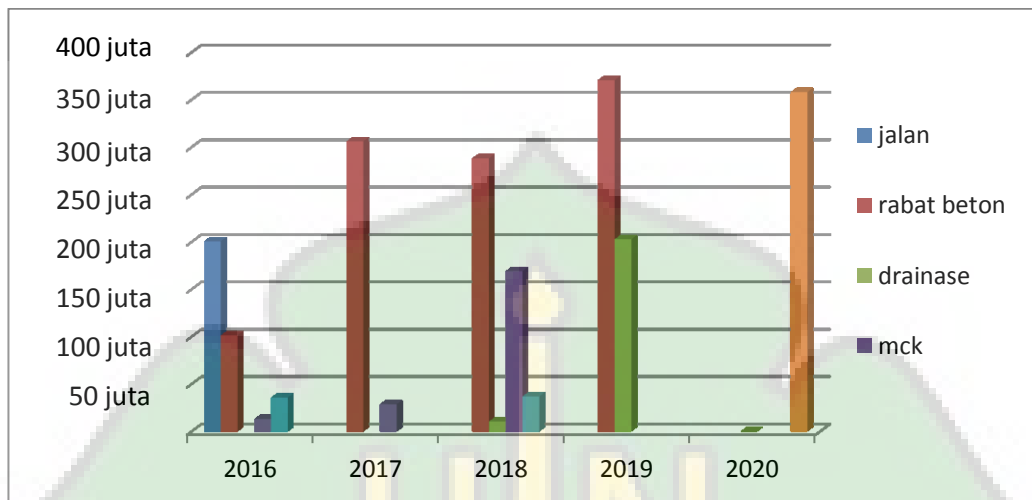
Sedangkan sisa 30% untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding.
- b. Biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan RT dan RW.
- c. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa.
- d. Biaya penyediaan data dan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban.⁴⁰

Pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Tensaran ini dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekretaris desa sebagai ketua pelaksana program. Dalam hal ini pada tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk bidang pembangunan rambat beton. Berikut adalah grafik anggaran dana desa dari tahun 2016-2020:

⁴⁰Andri Munawar, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,” Tesis, (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2019), h. 54.

Grafik 4.2
Anggaran Dana Desa 2016-2020



Sumber data: Kampung Tensaran (2021)

Grafik 4.2 menunjukkan sebagian besar dana desa untuk pembangunan fisik di alokasikan untuk pembangunan rabat beton dan gedung serbaguna. Rabat beton adalah sebuah pembangunan berbentuk jalan yang terbuat dari campuran batu-batuan, pasir dan semen. Rabat beton biasa dibangun didaerah yang merupakan jalan kecil yang sering digunakan oleh masyarakat. Pembangunan rabat beton di Kampung Tensaran atas dasar kepentingan masyarakat setempat, dimana jalan rabat beton dibangun daerah pemukiman dan jalan kearah ladang masyarakat. Sedangkan gedung serbaguna adalah bangunan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum, untuk berbagai macam kepentingan sesuai dengan kapasitas bangunannya.

Hal ini tampak pada pengalokasian dana desa pada tahun 2017,2018,2020.Pada tahun 2016 pembangunan fisiknya lebih menuju kepada pembangunan rabat beton, sebesar Rp.200.7 juta atau 79 % dari pembangunan

fisik lainnya, dan ini merupakan visi dari Reje Kampung Tensaran pada tahun tersebut untuk memberikan peningkatan jalan di Kampung Tensaran. Sedangkan sisa anggaran yang telah digunakan dalam pembangunan jalan digunakan untuk pembangunan lainnya dalam pengembangan desa seperti drainase, rabat beton, MCK dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dari bendahara Kampung Tensaran tentang fungsi pembuatan rabat beton:

“Rabat beton ini adalah jalan yang digunakan masyarakat untuk keperluan jalan menuju ladang masyarakat, dan lorong-lorong yang sering digunakan masyarakat dalam kemudahan berkendara.”⁴¹

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat kampung Tensaran mengenai pemanfaatan pembangunan fisik rabat beton:

“pembangunan ini sangat membantu, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kampung dan telah disepakati bersama. Sehingga mempermudah petani kampung mengakses jalan.”⁴²

Pada tahun 2017 diketahui bahwa adanya penurunan penerimaan dana desa yaitu sebesar Rp 437.4 juta sedangkan anggaran pada tahun sebelumnya berjumlah 486.2 juta pada bidang pembangunan, dikarenakan pada tahun 2016 telah dialokasikan dana anggaran 79 % nya pada jalan, sehingga pada tahun ini anggaran lebih menuju kepada pembangunan fisik rabat beton, dimana rabat beton ini dibangun untuk kepentingan masyarakat umum yang ada di Kampung Tensaran yaitu rabat beton lanjutan produksi berjumlah Rp.125,8 juta rabat beton lorong peternakan Rp.71.7 juta, rabat beton lorong aman pojan Rp. 19 juta dan rabat beton Lorong Pak Idris Rp.89.6 juta total keseluruhan anggaran dana desa pada pembangunan rabat beton tahun 2017 adalah Rp.306.2 juta sedangkan untuk

⁴¹Wawancara dengan bendahara Kampung Tensaran, Jam 8.30 Tanggal 27 Juni 2021

⁴²Wawancara dengan masyarakat perwakilan kelompok tani, Jam 8.30 Tanggal 7 Januari 2022

pembangunan lainya dialokasikan kepada pembangunan fisik lainya seperti MCK, turap, dan lain sebagainya.

Berikut adalah gambar pembangunan fisik rabat beton di Kampung Tensaran :

Gambar 4.1Pembangunan Fisik Rabat Kampung Tensaran



Sumber: Kampung Tensaran (2021)

Gambar diatas merupakan pembangunan jalan menuju perkebunan masyarakat, yang pastinya pembangunan rabat beton di Kampung Tensaran memiliki nilai yang berdampak baik bagi kepentingan masyarakat Kampung Tensaran. karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membawa hasil pertanian mereka dan juga sebagai kemudahan berkendara dalam menuju wilayah perkebunan mereka.

Dalam penggunaan anggaran tahun 2018 masih lebih menuju kepada pemeliharaan rabat beton, dimana gunanya pembangunan rabat beton yang telah dibangun pada tahun 2018 dirawat kembali, dikarenakan rabat beton sudah

banyak yang retak/berlubang akibat curah hujan dan pemakaian dari masyarakat Kampung Tensaran, dan ini menghabiskan banyak anggaran yaitu sebanyak Rp.228 juta, sedangkan pada pembangunan fisik lainnya dibangun dalam kepentingan umum seperti MCK yang berjumlah Rp.169.3 juta, TPT Rp.37.1 juta drainase Rp.10.6 juta dan lain sebagainya.

Berikut hasil wawancara kepada bendahara Kampung Tensaran atas fungsi dari pembangunan tersebut:

“Dalam pembangunan awal, jalan yang dibangun mengalami kerusakan dikarenakan musim hujan dan pada masa itu belum dibuat drainase. Sehingga air banyak mengedap di jalan yang membuat jalan cepat berlubang, jadi pada tahun 2018 ini kami menggunakan anggaran untuk perhaban atau peningkatan jalan rabat beton di Kampung Tensaran.”

Dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa pembangunan pada tahun 2018 memiliki banyak fungsi bagi masyarakat. Seperti halnya dalam pembangunan drainase, merupakan pembangunan dalam menjaga pengaliran air yang lebih efektif agar air hujan tidak mengedap di jalan. Dan dalam peningkatan jalan merupakan bentuk sebuah tahapan evaluasi dalam memberikan perubahan bagi desa agar terus maju.⁴³

Pada tahun 2019 anggaran digunakan pada pembangunan rabat beton jalan produksi dan Jalan Sara Ine, dimana jalan ini yang sering digunakan masyarakat dalam mengambil hasil pertanian dan juga dalam pemakaian setiap harinya.

Pada tahun 2020 anggaran dana desa dalam pembangunan fisiknya lebih besar kepada pembangunan gedung serbaguna. Hal ini disebabkan karena

⁴³Wawancara dengan bendahara Kampung Tensaran, Jam 08.30 Tanggal 27 Juni 2021.

pembangunan fisik seperti jalan/rabat beton, MCK, Drainase, saluran air dan lainnya sudah baik. Sehingga anggaran dana desa tahun 2020 di alihkan kepada pembangunan gedung serbaguna yang menghabiskan anggaran Rp.358.2 juta.

Selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada masyarakat Kampung Tensaran dalam mengenai fungsi dari rabat beton:

“Menurut kami, jalan ini sangat penting bagi kami, karena biasa kami gunakan dalam mempermudah membawa hasil dari pertanian kami.”⁴⁴

Jadi, dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tensaran pada tahun 2016-2020 lebih mengutamakan kepada pembangunan fisik untuk jalan/rabat beton yang nantinya akan berdampak bagi kepentingan masyarakat. Karena masyarakat Kampung Tensaran adalah masyarakat mayoritas pertanian yang sangat membutuhkan jalan untuk mereka lalui ketika mengangkut hasil pertanian dan juga pembangunan jalan baik merupakan simbol dari kampung yang memiliki nilai pembangunan yang baik.

4.1.4 Belanja Pembangunan Infrastruktur Kampung Tensaran Tahun 2020

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau

⁴⁴Wawancara dengan masyarakat perwakilan kelompok agama Kampung Tensaran, 7 Januari 2022

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.⁴⁵ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi, menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

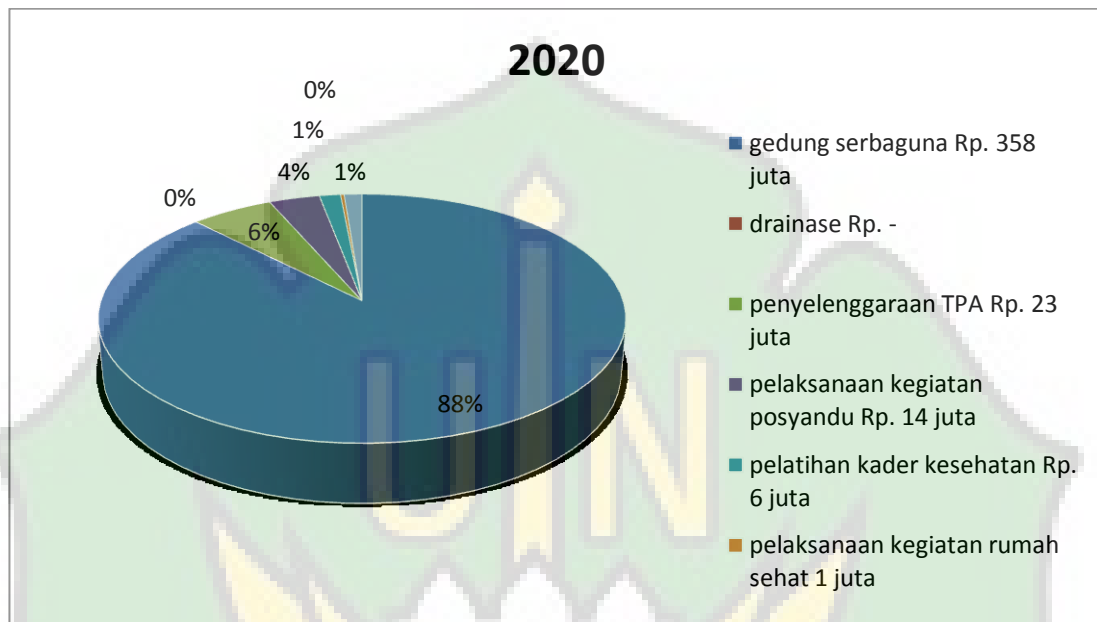
Dalam belanja pembangunan di kampung tensaran sudah dibuat dalam RAB ataupun Rencana Anggaran Biaya, dimana memiliki tujuan sebagai penjalanan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai ketentuan yang telah direncanakan. Dan ini merupakan bentuk transparansi dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai biaya anggaran dana desa. Berikut merupakan lampiran 4.1 contoh rencana anggaran dalam pembangunan rabat beton Kampung Tensaran pada tahun 2020.

Belanja modal dalam pembangunan di Kampung Tensaran, dalam lima tahun terakhir tepatnya pada tahun 2020 di sini pembangunan Kampung Tensaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena anggaran sudah banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa pada lima tahun terakhir, sehingga pada tahun 2020 anggaran dana desa tidak berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Kemudian pada tahun 2020 adanya pandemi covid-19 dimana dana desa digunakan juga sebagai bantuan untuk kebutuhan masyarakat di kampung tersebut.

⁴⁵Syaiful, 2010, *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*, Diakses di <http://ukdm-upi.com/contact-us> Tanggal 10 November 2021 Pukul 09.15.

Berikut Merupakan Grafik Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2020:

Grafik 4.3
Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020



Sumber: *KampungTensaran (2021)*

Grafik diatas menunjukkan sebagian besar dana pada tahun 2020 dalam pembangunan fisik dialokasikan untuk pembangunan gedung serbaguna sebesar 88% yaitu Rp358 juta. Berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris Kampung Tensaran:

”Pembangunan di Kampung ini berdasarkan hasil musrenbang, disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, dan dimana kampung ini tidak ada gedung serbaguna sehingga kami bangun yang nanti akan dipakai untuk kantor desa.”⁴⁶

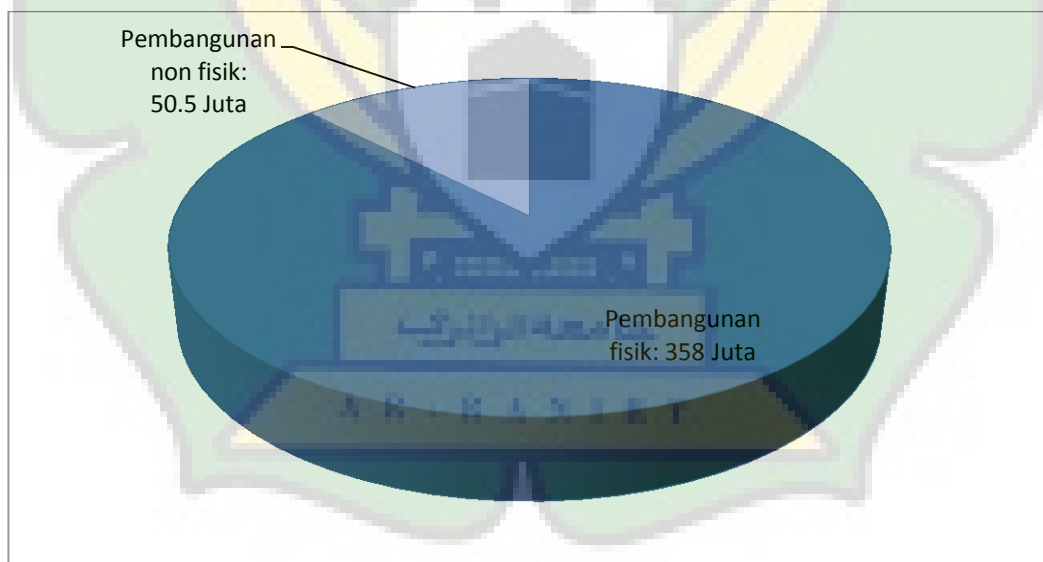
Dari hasil wawancara di atas dapat kita nyatakan bahwa anggaran pada tahun 2020 sangat besar kepada pembangunan gedung serbaguna, karena merupakan dari hasil musrenbang desa dan sesuai kebutuhan kampung dalam

⁴⁶Wawancara dengan Sekretaris KampungTensaran, Jam 9.00 Tanggal 8 Juni 2021

pembangunan desa, sedangkan dalam pembangunan lainnya lebih kepada non fisik. Dikarenakan pada tahun 2020 adanya wabah corona, pemerintahan desa Kampung Tensaran memberikan peningkatan kesehatan agar menciptakan kampung sehat yang terhindar dari virus corona, dengan memberikan peningkatan kesehatan seperti pelaksanaan kegiatan kesehatan, pelatihan kader kesehatan, peningkatan keamanan kesehatan dengan wajib memakai masker dan cuci tangan, pelaksanaan kegiatan rumah sehat dan segala bentuk yang bertentangan dengan kesehatan. Dan hal di atas juga dapat kita lihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 4.4

Pembangunan Fisik Dan Non Fisik



Sumber: Kampung Tensaran (2021)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pembangunan pada tahun 2020 lebih menuju kepada pembangunan fisik yaitu gedung serbaguna senilai Rp. 358.2 juta. Dan pembangunan non fisik yaitu penyelenggaraan TPA Rp. 23.8 juta,

pelaksanaan kegiatan posyandu 14.5 juta. Pelatihan kader kesehatan Rp. 6 juta. Pelaksanaan kegiatan rumah sehat Rp. 1 juta dan penyelenggaraan informal dan publikasi Rp. 5 juta. Dalam pembangunan fisik sangat besar kepada pembangunan gedung serbaguna, dengan fungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kampung dan juga sebagai tempat kepentingan bagi masyarakat kampung. sedangkan dalam pembangunan non fisik pada tahun 2020 lebih menuju kepada peningkatan SDM kampung, seperti pelaksanaan kegiatan posyandu, pelatihan kader kesehatan, pelaksanaan kegiatan rumah sehat. Dan berikut adalah hasil wawancara kepada sekretaris desa mengenai pembangunan non fisik :

“Pada tahun 2020 anggaran pada pembangunan non fisik kami gunakan dalam peningkata kesehatan kampung dan juga dana desa kami gunakan sebagai BLT bagi masyarakat desa dalam masa pandemi, dikarenakan ekonomi masyarakat sangat menurun.”⁴⁷

Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran bergantung kepada kebutuhan masyarakat sehingga memberikan pembangunan yang efektif.

4.1.5 Analisa Pengelolaan Dana Desa Pembangunan Kampung Tensaran

Dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa bagian penting sebagai tolak ukur pembangunan yang sudah efektif, mulai dari *equity, equality*, dan *adequancy* (cukup). Tujuannya adalah untuk memberikan kesesuaian kinerja dengan kegiatan yang dilakukan.

⁴⁷Wawancara dengan Sekretaris Kampung Tensaran, Jam 9.00 Tanggal 28 Juni 2021

a. *Equity* (keadilan)

Equity (keadilan) berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.⁴⁸ Menurut M Umer Chapra dalam Idris, keadilan dalam bidang ekonomi menyangkut empat hal yaitu *need fulfilment* (pemuahan kebutuhan), *respectable source of earning* (sumber penghasilan yang terhormat), *equitable distribution of income and wealth* (distribusi penghasilan dan harta yang berkeadilan), dan *growth and stability* (perkembangan dan stabilitas).⁴⁹ Penyaluran dana desa harus dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan penganggaran yang disesuaikan oleh pemerintah. Dalam aspek keadilan pembangunan kampung Tensaran, memprioritaskan pada dusun yang lebih membutuhkan berdasarkan hasil musyawarah bersama, contohnya sepertidusun burmine yang memerlukan pembangunan rabat beton sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas, sehingga pembangunan pada tahun 2018 digunakan pada rabat beton. Sedangkan pada dusun burbiah memerlukan pemeliharaan rabat beton yang dibangun pada tahun sebelumnya yang sudah rusak, sehingga pada tahun 2018 dusun burbiah hanya digunakan dalam pemeliharaan rabat beton. Adanya pembangunan dan peningkatan pada dusun burbiah dan dusun burmine memberikan penjelasan bahwa Kampung Tensaran memiliki aspek keadilan dalam pembangunan infrastruktur desa.

⁴⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009).

⁴⁹Idris, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 31.

Berikut merupakan wawancara terhadap masyarakat Kampung Tensaran mengenai keadilan dalam pembangunan:

Menurut saya, sudah baik. Karena aparat desa dalam membangun sesuai dengan keinginan masyarakat dan selalu mengadakan musyawarah tiap pengadaan pembangunan-pembangunan.⁵⁰

b. *Equality* (Pemerataan)

Pemerataan pembangunan adalah sebuah pembangunan dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah, dengan tujuan adanya pertumbuhan positif yang terjadi dalam semua bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan bidang lainnya dengan akhir tujuan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam aspek *equality* (pemerataan) pembangunan Kampung Tensaran sudah sesuai dengan kebutuhan desa, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan-pembangunan fisik pada Kampung Tensaran, seperti pada pembangunan pada dusun burbiah pada tahun 2016 adanya pembangunan rabat beton dan adanya pembangunan drainase pada dusun burmine, hal ini sesuai dengan kebutuhan setiap dusunnya. Berikut adalah hasil wawancara kepada kaur pembangunan mengenai pemerataan pembangunan:

“dalam pemerataan pembangunan, kami melihat sesuai dengan hasil musyawarah, misalnya dusun burbiah memerlukan perbaikan jalan, dan dusun burmine memerlukan pembangunan drainase, maka kami menyesuaikan berapa anggaran sesuai dengan kebutuhan.

⁵⁰Musyawarah Terhadap Masyarakat Perwakilan Kelompok Pemuda Kampung Tensaran, Jum'at. Jam 9.00 WIB

c. *Adequancy* (Kecukupan)

Adequancy (Kecukupan) adalah keadaan berkecukupan untuk maksud tertentu. Penyaluran dana harus memenuhi kebutuhan infrastruktur desa. Pengelolaan dana desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat dengan prinsip transparansi pembangunan dalam setiap perencanaan dana desa yang dilakukan melalui pengadaan rapat atau musyawarah dewasa. Dalam aspek *adequancy* (kecukupan) dalam pembangunan Kampung Tensaran sudah memenuhi kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dapat dilihat seperti dalam pembangunan fisik pada tahun 2016 adanya perencanaan pembangunan fisik drainase sepanjang 61 meter, dan realisasi pembangunan pada pembangunan fisik dibangun drainase sepanjang 80 meter, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kampung Tensaran memiliki kesesuaian dalam penggunaan anggaran dana desa. Berikut adalah tabel analisa pengelolaan dana desa pada pembangunan Kampung Tensaran:

Tabel 4.1 Analisa Pengelolaan Dana Desa Pembangunan Kampung Tensaran

Tahun	Musrembang	Realisasi Pembangunan	Efektivitas	Equality (Pemerataan)	Equity (Keadilan)	Adequansi (Kecukupan)
2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Burmine memerlukan drainase di jalan Posyandu, sepanjang 61 meter. b. Dusun Burmine memerlukan pembangunan MCK, dengan volume 12 M c. Dusun Burbiah memerlukan rabat beton pada Lr Amin. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan drainase pada Dusun Burmine + 80 M. b. Pembangunan MCK dengan volume 12 M pada Dusun Burmine. c. Pembangunan rabat beton pada Lr Pak Amin Dusun Burbiah 	Perencanaan Pembangunan sesuai dengan realisasi pembangunan	✓	✓	✓
2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Dusun burbiah memerlukan rabat beton pada Lr Pak idris dan Lr Aman Fozan. b. Dusun burmine memerlukan rabat beton pada Lr. Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan rabat beton pada Lr Pak Idris dan Lr Aman Fozan b. pembangunan rabat beton pada Lr.peternakan 	Perencanaan Pembangunan sesuai dengan realisasi pembangunan	✓	✓	✓

2018	<p>a. Dusun Burbiah dan Burmine memerlukan peningkatan/perbaikan rabat beton</p> <p>b. dusun burmine memerlukan pembangunan/pemeliharaan MCK umum</p> <p>c. Dusun burbiah memerlukan pemeliharaan drainase</p>	<p>a. Adanya peningkatan jalan rabat beton pada dusun bumine dan burbiah</p> <p>b. pembangunan dan pemeliharaan MCK pada dusun burmine</p> <p>c. adanya peningkatan /pemeliharaan drainase</p>	Perencanaan Pembangunan sesuai dengan realisasi pembangunan	✓	✓	✓
2019	<p>a. Dusun burbiah memerlukan jalan pada Ir sara ine dan jln produksi sebagai jalan menuju perkebunan</p> <p>b. dusun burmine memerlukan pembangunan saluran drainase</p>	<p>a. Pembangunan rabat beton pada Ir Sara Ine dan Jln Produksi.</p> <p>b. pembangunan saluran drainase pada dusun burmine</p>	Perencanaan Pembangunan sesuai dengan realisasi pembangunan	✓	✓	✓
2020	<p>a. Dusun burbiah dan Dusun burmine memerlukan gedung serbaguna</p>	<p>a. Pembangunan Gedung Serbaguna</p>	Perencanaan Pembangunan sesuai dengan realisasi pembangunan	✓	✓	✓

Sumber: RPJM Kampung Tensaran

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa *equity* dan *equality* pengelolaan dana desa Kampung Tensaran sudah efektif. Kampung Tensaran memiliki prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan, sehingga memberikan kesesuaian terhadap keinginan masyarakat. Jika dilihat dari *eduquancy* (kecukupan) dalam masalah anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan pemerintahan Kampung Tensaran sudah merencanakan berapa anggaran pada setiap dusunnya, sehingga dana desa mencukupi pada tiap tahun.

4.2 Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah

4.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan pendukung. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadiya sesuatu.⁵¹ Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya, komitmen masyarakat yang dapat mewujudkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik Kampung Tensaran, kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah: partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan, adanya bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa, kapasitas pemerintahan desa yang baik. Perencanaan pembangunan desa yang baik.

⁵¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses di <http://Kamusbahasaindonesia.org> Pada Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 18.00 WIB.

a. Partisipasi masyarakat

Kampung Tensaran memiliki masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan pengembangan bagi desanya. Dimana masyarakat selalu membantu aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan.

b. Kapasitas aparatur desa Kampung Tensaran

Aparatur pemerintah Kampung Tensaran memiliki keterampilan yang operasional dibidang mereka masing-masing, seperti operator desa yang memiliki kemahiran dalam menggunakan komputer dalam pembuatan surat-surat dalam kepentingan kantor ataupun keperluan masyarakat yang datang, dan Kepala Desa yang selalu memberikan arahan yang baik agar terus memiliki kemajuan khususnya bagi Kampung Tensaran, dan juga aparatur pemerintahan desa yang memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi, dikarenakan pemerintahan desanya kita lihat hadir tepat waktu ke kantor, memakai seragam yang telah ditetapkan, dan juga hadir dalam acara apel pagi tiap hari senin.

Dalam peningkatan kapasitas aparatur desajuga diadakan pelatihan kapasitas aparatur desa pada tiap tahunnya, dengan tujuan sebagai peningkatan kapasitas aparatur desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dan denganya adanya pelatihan kapasitas aparatur desa meberikan sasaran pembangunan yang lebih terarah, dan membentuk nilai akuntabilatas dalam pengelolaan dana desa yang berdampak positif bagi pembangunan desa.

Berikut merupakan wawancara pada masyarakat kampung tensorsan mengenai kapasitas aparaturnya:

“sudah cukup baik, karena kita lihat banyaknya peningkatan dalam pembangunan dikampung ini, seperti adanya pelatihan penanaman cabe, pelatihan kader kesehatan, dan adanya pembangunan-pembangunan fisik yang sesuai dengan keinginan masyarakat”⁵²

c. Transparansi pengelolaan dana desa

Keterbukaan Pengelolaan dana desa Kampung Tensorsan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sampai dengan tahapan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Dan hal ini dipaparkan oleh sekretaris desa mengenai transparansi pengelolaan dana desa:

“Dalam setiap pembangunan yang akan di bangun di kampung ini, kami mengadakan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, biasanya seluruh aparaturnya, seluruh perangkat desa dan juga sejumlah masyarakat dikumpulkan dalam memberikan pendapat tentang pembangunan, biasanya seluruh kepala dusun memberikan arahan kepada warga dusunnya tentang keperluan apa yang akan dibangun didusunnya, agar sesuai dengan kepentingan. Dan juga Segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan kami mengumumkan dalam di papan pembangunan desa”⁵³

Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh kepala desa mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami mengadakan musrenbang setiap tahun untuk menentukan prioritas tiap tahunnya, dan disini Reje Kampung Tensorsan memiliki RPJM dalam merencanakan pembangunan.”

⁵²Wawancara dengan masyarakat Kampung Tensorsan, jam 15.00 Tanggal 8 Januari 2022

⁵³Wawancara dengan Sekretaris Kampung Tensorsan, Jam 9.00 Tanggal 27 Juni 2021.

sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Pada umumnya semua kegiatan pasti mengalami berbagai hambatan atau kendala-kendala, sehingga belum berjalan sesuai yang diharapkan. Biasanya, hambatan tersebut berasal dari aspek struktural dan aspek teknis. Aspek struktural yaitu proses pembangunan yang kurang memperoleh perhatian dari pihak manajemen tata kelola kampung setempat. Sedangkan aspek teknis artinya keberadaan dalam hal pembangunan infrastruktur desa belum ditunjang aspek-aspek bersifat teknis yang sebenarnya sangat dibutuhkan, misalnya dana, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

Hal berikut juga disampaikan oleh Reje Kampung Tensaran mengenai hambatan dalam pembangunan:

“Dalam pembangunan desa hambatannya biasa terjadi karena sumber daya manusianya yang masih kurang baik, misalnya dalam pembuatan drainase, rabat beton terkadang dalam adukan semen masi kurang sesuai dengan ukurannya, sehinga bangunan cepat pecah. Dan dari segi lainnya biasa diakibat dari faktor cuaca.”⁵⁵

Dalam pembangunan Kampung Tensaran memiliki tingkatan pembangunan yang sudah dikategorikan dalam pembangunan baik, tetapi memiliki hambatan dalam beberapa hal pembangunan seperti:

- a. Dalam pembangunan fisik Kampung Tensaran adanya masalah dalam pembangunan jalan dalam pembebasan lahan oleh masyarakat desa tersebut, sehingga adanya jalan yang masih rusak.

⁵⁵Wawancara dengan Reje Kampung Tensaran, Jam 10.00 Tanggal 28 Juni 2021.

- b. Adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pembangunan desatersebut.

hal berikut juga disampaikan oleh bendahara Kampung Tensaran mengenai hambatan dalam pembangunan.

“Biasanya hambatan terjadi karena faktor cuaca, ketika pembangunan desa sudah mulai terkadang curah hujan menghambat pembangunan. Dan faktor lainnya yaitu dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak membebaskan lahan.”⁵⁶

Dari pemaparan di atas kita simpulkan bahwa dalam pembangunan di Kampung Tensaran memiliki hambatan yang dikarenakan karena masyarakat sendiri yang tidak memberikan pembebasan lahan, dan kejadian ini banyak terjadi di suatu daerah tertentu khususnya pada daerah perkampungan.

Berikut adalah contoh jalan yang sampai sekarang belum ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya:

Gambar 4.3 Pembangunan Fisik Dusun Burmine



Sumber : Kampung Tensaran (2021)

Dari gambar diatas kita lihat pembangunan jalan pada Dusun Burmine masih kurang efektif dari pada pembangunan Dusun Burbiah, jalan tersebut dapat kita lihat belum ada pembangunan yang sudah direnovasi dalam pembangunan

⁵⁶Wawancara dengan Bendahara Kampung Tensaran. Jam 9.00 Tanggal 28 Juni 2021

fisik seperti jalan dan belum ada pembangunan drainase. Sedangkan bisa kita lihat perbandingan pembangunan pada Dusun Burbiah pada pembangunan fisiknya:

Gambar 4.4
Pembangunan Dusun Burbiah



Sumber: Kampung Tensaran (2021)

Gambar diatas, menjelaskan bagaimana perbandingan dalam pembangunan fisik di Kampung Tensaran. Dimana dipada Dusun ini menggambarkan tentang pembangunan yang efektif, sedangkan pada Dusun Burbiah memiliki hambatan dalam pembangunan dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak memberikan izin dalam pembebasan lahan. Hambatan pembangunan memberikan nilai yang kurang baik bagi kampung, dikarenakan kunci dari keberhasilan desa adalah dari pembangunan desa yang sudah baik. Dikarenakan jika melihat pembangunan yang sudah baik, yang pastinya adanya pengelolaan dana desa yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dilakukan pada pengelolaan dana desa Kampung Tensaran Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah dinilai sudah efektif dari sisi hasil akhir pembangunan. Dilihat dari pembangunan kampung tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perubahan, dalam penyelenggaraan pembangunan memberikan prinsip keadilan, kecukupan dan pemerataan, sehingga anggaran dalam pembangunan memadai sesuai dengan tujuan pembangunan. Pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran dilaksanakan secara transparansi. Hal ini tampak dari sisi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang bertujuan tidak adanya kesalahan dalam penggunaan anggaran. Kemudian, dalam pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran oleh pemerintahan desa digunakan berdasarkan kepentingan masyarakat atau sebagaimana yang dituangkan dalam hasil musrenbang.

Faktor pendukung dalam pembangunan Kampung Tensaran adalah pemerintahan desa Kampung Tensaran memiliki prinsip keterbukaan pada penggunaan anggaran dan bertanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan dalam mengelola dana desa. dan juga masyarakat sendiri

berpasipasi dalam meningkatkan pembangunan-pembangunan di Kampung Tensaran.

2. Hambatan yang dialami oleh Kampung Tensaran dalam pembangunan infrastruktur desa yaitu lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu, tantangan dalam pembangunan kampung Tensaran adalah adanya kontrak sosial antara pemerintahan desa dengan masyarakat setempat seperti sebagian masyarakat tidak memberikan pembebasan lahan sebagai tempat pembangunan desa dan juga faktor cuaca yang memberikan kendala terhadap pembangunan.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintahaham Kampung Tensaran

Bagi Pemerintahan Kampung Tensaran diharapkan lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur pada kampung Tensaran sesuai kebutuhan kampung, Dengan adanya pembangunan sesuai dengan kebutuhan akan menjawab tantangan-tantangan dalam masalah ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas perekonomian warga. Peningkatan pengelolaan dana desa dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang merupakan bagian yang penting bagi pembangunan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan kajian mendalam tentang prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rusdin Pohan. 2017. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Ar-Rijal Institute.
- Muhammad Mustari. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto. 2009. *Redefinisi dan Revitalitas Penyuluhan Pembangunan dalam Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Kumba Digdowiseiso. 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta: LPU UNAS.
- Muh. Fitrah, Luthfiya. 2017. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: Jejak.
- Saefullah. 2014. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharsimi Arikunto. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikundo. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Idris. 2015. *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Grigg Neil. 1988. *Isfrastructure Engineering and Manajemen*. John Wiley and Son.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbngan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Bpkp.

Jurnal:

- Prianto Tiar Pandeiror, dkk. 2018. *Transparansi Pengelolaan Dana desa dalam*

Pembangunan Infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Jurusan Ilmu pemerintahan, Vol. 1, No. 1. Universitas Sam Ratulangi.

Yamulia Hulu, dkk. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 10, Nomor 1.

Risya Novita Sari, Dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No 11.

Abu Rahum. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, dalam Jurnal Pemerintahan, Vol. 3, No 4.

Faizul Karimah, dkk. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. Jurnal ADministrasi Publik. Vol 2. Nomor 4. Universitas Brawijaya Malang.

Hera Novita, *Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I Sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 Pada Satuan Kerja di Kewilayahan Polda Jatim*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 4, No. 10 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses di <http://Kamusbahasaindonesia.org> Pada Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 18.00 WIB.

M. Rinaldi Aulia. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana desa Pada Pemerintahan desa (Studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman)*. "Skripsi." Banda Aceh Universitas Syiah Kuala.

Solichin, Samsul Akmal. *Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur desa (Studi di desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Tolo Kabupaten Seluma*. dalam jurnal Penelitian Social dan Politik. Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Tifani Ardilah, dkk. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal ADministrasi Publik. Vol. 2, No. 1.

Endang Juliana. 2017. *"Efektivitas Pemanfaatan Dana desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan,"Skripsi"*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Adam Latif, dkk. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Insfrastruktur di desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Moderat. Vol. 5, No. 1. Februari.

Hizkia Victor. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrument Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.*” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi.

Andri Munawar. 2019. *Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.* “Tesis”. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Syaiful. 2010. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan,* Diakses di <http://ukdm-upi.com/contact-us> Tanggal 10 November 2021 Pukul 09.15.

Peraturan Perundang Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Priotas Penggunaan Dana Desa Pasal 1.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

NO	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Kepala desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan? 2. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan? 3. Bagaimana proses tanggung jawab/Pelaporan dalam pembangunan? 4. Bagaimana sistem keterbukaan dalam penggunaan dana desa 5. Apa saja fungsi pembangunan dalam pembangunan fisik? 6. Bagaimana dalam kecukupan dana dalam setiap pembangunan 7. Apa saja hambatan dalam pembangunan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan pembangunan, kami mengadakan musrembang setiap tahun untuk menentukan priotas tiap tahunnya, dan disini reje kampung tensorsan memiliki RPJM dalam merencanakan pembangunan. 2. Pelaksanaan pembangunan menuju kepada hasil dari musyawarah masyarakat. 3. setiap pembangunan yang telah dilaksanakan harus dibuat SPJ dalam rangka memberikan keterbukaan dalam penggunaan anggaran dana desa 4. setiap anggaran yang telah dipakai dalam pembangunan kami membuat papan anggaran yang di letak didepan kantor desa. 5. membuat desa lebih maju, misalnya seperti rabat beton. Memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam penggunaan jalan dalam mengangkut hasil pertanian. 6. Menurut saya, alhadulillah dari beberapa tahun ini anggaran tidak ada kendala. 7. Hambatan biasa karena dari faktor cuaca dan juga karena kurangnya SDM dalam memahami cara pembangunan yang baik.

2	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahapan perencanaan pembangunan? 2. Bagaimana proses dalam penatausahaan pembangunan 3. Mengapa anggaran dari tahun 2016-2020 lebih besar pada pembangunan fisik rabat beton? 4. Apa saja kendala dalam pembangunan di desa tensorsan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan yang ingin di bangun kampung tensorsan ini berdasarkan dari kemauan dan kepentingan masyarakat yang akan dibangun setelah adanya musyararah desa 2. segala kegiatan pembangunan kami mendatata seluruh pengeluaran dan pemasukan untuk dibuat laporan pembangunan 3. karena rabat beton ini adalah jalan yang digunakan masyarakat untuk keperluan jalan menuju ladang masyarakat dan juga jalan yang dipakai sehari-hari. 4. dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak membebaskan lahan dan juga dari faktor hujan.
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. kenapa anggaran pada tahun 2020 lebih besar dalam pembangunan fisik gedung serbaguna 2. bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar memiliki tempat penyimpanan barang2 desa dan nantinya akan bisa dijadikan kantor 2. Masyarakat dapat dikatakan yang royal dalam peningkatan pembangunan 3. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan kami mengumumkan dalam di papan pembangunan desa.
4	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana menurut bapak, apakah memiliki kepuasan dalam pembangunan di desa ini? 2. Apakah pemerintahan desa memberikan pengembangan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iya, misalnya dalam pembangunan jalan, ini sangat penting bagi kami, karena biasa kami gunakan dalam mempermudah membawa hasil dari pertanian kami 2. Menurut saya, jika kita lihat

		<p>pengelolaan danadesa?</p> <p>3. Apakah pemerintahan desa mempunyai keterbukaan dalam penguasaan danadesa?</p> <p>4. Apa harapan ibu dalam pembangunan di desa ini</p>	<p>idari tahun ketahunya , kami melihat selalu ada pengembangan.</p> <p>3. Iya, semua anggaran sudah di umumkan kepada masyarakat di papan anggaran .</p> <p>4. Semoga kedepanya dapat memberikan desa ini maju dan berkembang lagi.</p>
--	--	--	--



Lampiran Dokumentasi



Wawancara Dengan Reje Kampung Tensaran



Wawancara Dengan Bendahara Kampung Tensaran



Wawancara Dengan Sekretaris Kampung Tensaran



Wawancara Bersama Aparatur Kampung Tensaran



Wawancara Bersama Masyarakat perwakilan kelompok pendidikan



Wawancara Bersama Masyarakat perwakilan kelompok miskin



Wawancara bersama masyarakat perwakilan kelompok tani



Wawancara bersama kaur pembangunan kampung Tensaran



Wawancara bersama masyarakat pengelola BUMK kampung Tensaran



Wawancara bersama ketua pemuda Kampung Tensaran



Wawancara bersama masyarakat kelompok tokoh agama



Lampiran 5.1 Rencana Anggaran Dalam Pembangunan Rabat Beton Kampung

Tensaran Pada Tahun 2016:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jmlh Total	Ppn 10%	Pph1,5 %	Jmlh
I	Bahan						
1	Pasir beton	12.0	140.000	1.680.000		25.000	1.845.000
2	Batu mangga	15.0	160.000	2.400.000		36.000	2.596.000
3	Kerikil	19.0	140.000	2.660.000		39.000	2.839.000
4	Kayu 2/2	12.0	30.000	360.000	18.000	5.400	413.400
5	Tanah timbun	50.0	80.000	4.000.000		66.000	4.066.000
6	Paku	10.0	18.000	180.000			198.000
7	Papan Mall	12.0	40.000	480.000		7.200	487.200
8	Triplek plywoodd	4.0	80.000	320.000	32.000		340.000
9	Semen	191.0	60.000	11.460.000	1.146.000		4752.000
II	ALAT						
1	Timba cor	10	10.000	100.000	10.000		110.000
2	Plangki	4	25.000	100.000	10.000		110.000
3	Kereta sorong	2	400.000	800.000	80.000		880.000
III	UPAH						
1	Pekerja	93	80.000	7.440.000			7.440.000
2	Tukang	10	100.000	1.000.000			1.000.000
IV	Op						
	Perencanaan	3					1.053.000
	Pengawasan	2					680.000
	Tim TPK						
	Ketua						150.000
	Sekretaris						125.000
	Angota						300.000
						Total	12.000.000

Musyawarah telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Kampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Urutan	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Dana Desa (APBN)	PA Kampung/Swadaya/Partisipasi/Dll	Jumlah
2	3	4	5	6	7
Sisa Dana			25.603.812		25.603.812
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG :					
Penghasilan tetap dan tunjangan keje					
2	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung	29.120.400	-	992.078	30.112.478
3	Tunjangan RGM	148.026.000	-	5.952.462	153.978.462
4	Tunjangan Imem dan Petue	38.400.000	-	4.960.385	43.360.385
5	Insentif Petugas Pemungut Pajak PBB (1 Orang) dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	24.000.000	-	1.984.154	25.984.154
			6.601.274	-	6.601.274
	Sub Total	239.546.400	6.601.274	13.889.079	260.036.753
B. Operasional Perkantoran:					
1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Reje dan Perangkat	-	2.871.288	-	2.871.288
2	Penyediaan Operasional Pemerintahan Kampung	-	52.101.200	-	52.101.200
3	Penyediaan Operasional RT/RW	-	-	-	-
4	Belanja Modal	1.260.000	6.624.400	-	7.884.400
	Sub Total	1.260.000	61.596.888	-	62.856.888
C. Operasional RGM:					
1.	Belanja Barang dan Jasa	-	2.336.000	-	2.336.000
2.	Belanja Modal	-	-	-	-
	Sub Total	-	2.336.000	-	2.336.000
D	Penyusunan Pendataan Profil Kampung/Prodeskel	-	7.361.000	-	7.361.000
E	Penyusunan Dokumen RKPK Kampung	-	2.909.000	-	2.909.000
F	Penyusunan APBK Kampung	-	3.301.000	-	3.301.000
G	Pemilihan RGM	-	2.662.000	-	2.662.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG					
1	Dukungan Penyelenggaraan TPA Kampung	-	23.812.800	-	23.812.800
2	Pelaksanaan Kegiatan Posyandu	-	19.155.000	-	19.155.000
3	Pelaksanaan Kegiatan Posbindu	-	14.546.000	-	14.546.000
4	Pelatihan Kader Kesehatan	-	6.067.000	-	6.067.000
5	Pelaksanaan Kegiatan Rumah Desa Sehat	-	1.022.000	-	1.022.000
6	Pembangunan Gedung Serba Guna	-	358.279.000	-	358.279.000
7	Pembangunan Gapura Kampung	-	-	-	-
8	Perehapan Drainase Kampung Uk. 50m	-	6.018.000	-	6.018.000
9	Gotong Royong	-	5.129.000	-	5.129.000
10	Penyelenggaraan Informasi dan Publikasi	-	-	-	-
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
1	Honor Tim Penegak Syariat Islam dan Adat Istiadat	-	14.100.000	-	14.100.000
2	Insentif Linmas Kampung	-	4.800.000	-	4.800.000
3	Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba	-	-	-	-
4	Pelaksanaan MTQ Kampung	-	-	-	-

AR-RANIBY

musyawarah telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Kampung Tensaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)	Dana Kampung (APBN)	Lain-lain Pendapatan Kampung yang Sah (PAK)	Jumlah
2	3	4	5	6	7
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG					
1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Reje	16,200,000	-	-	1,000,000	17,200,000
2. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan RGM, Petue & Imem Kampung	91,740,000	-	-	13,000,000	104,740,000
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung	68,337,000	2,115,926	-	-	70,452,926
4. Penyediaan Operasional RGM	4,100,000	-	-	-	4,100,000
5. Penyusunan Profil Kampung	830,000	3,980,000	-	-	4,810,000
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung & RKP Kampung)	8,960,915	-	-	-	8,960,915
7. Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (Penyusunan APBKampung & Pelaporan APBKampung)	3,301,000	-	-	-	3,301,000
8. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilhan Reje	22,000,000	-	-	-	22,000,000
Jumlah	215,468,915	6,095,926	-	14,000,000	235,564,841
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG					
Penyelenggaraan TPA Milik Kampung	-	-	27,100,000	-	27,100,000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Kampung	-	-	16,640,000	-	16,640,000
Pembangunan Rabat Beton Jalan Produksi dan Sara Ine	-	-	370,770,000	-	370,770,000
Pembangunan Saluran Drainase	-	-	202,599,000	-	202,599,000
Pelaksanaan Gotong Royong Kampung	-	-	6,018,000	-	6,018,000
Jumlah	-	-	623,127,000	-	623,127,000



Musyawarah telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Kampung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)	Dana Kampung (APBN)	Lain-lain Pendapatan Kampung yang Sah (DLL)	Jumlah	
2	3	4	5	6	7	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG						
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	102,120,000	-	-	-	102,120,000
2	Belanja Operasional Kantor Reje	58,594,000	3,200,000	-	-	61,794,000
3	Belanja Operasional Rayat Genap Mupakat (RGM)	3,312,000	-	-	-	3,312,000
4	Musyawarah Perencanaan RPKKampung	5,335,000	-	-	-	5,335,000
5	Operasional Lainnya	6,000,000	-	-	-	6,000,000
Jumlah		175,361,000	3,200,000	-	-	178,561,000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG						
1	Pembangunan/Pemeliharaan Drainase	-	-	10,674,500	-	10,674,500
2	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	-	-	288,308,000	-	288,308,000
3	Pembangunan/Pemeliharaan MCK Umum	-	-	169,364,600	-	169,364,600
4	Pengadaan/pengembangan Peralatan /Poeyandu/Polindes/Posbindu	-	-	9,027,000	-	9,027,000
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	-	-	37,160,000	-	37,160,000
6	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Taman Pendidikan Al-Qur'an	-	-	9,131,000	-	9,131,000
7	Pembangunan/Pemeliharaan Fasilitas umum lainnya	-	-	4,020,000	-	4,020,000
Jumlah		-	-	527,685,100	-	527,685,100
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
1	Pelaksanaan Syariat Islam, Adat Istiadat dan Kamtibmas	-	-	15,960,000	-	15,960,000
				5,000,000	-	5,000,000

AR-RANIBY

Musyawarah telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Kampung Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Dana Kampung (APBN)	Dana Kampung (APBA)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
i. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :						
1 Belanja Pegawai:						
	1 Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat Kampung	81,120,000	-	-	-	81,120,000
	2 Tunjangan RGM	21,000,000	-	-	-	21,000,000
	Sub Total	102,120,000	-	-	-	102,120,000
2 Operasional Perkantoran:						
	1. Belanja Barang dan Jasa	10,402,951	3,071,461	-	-	13,474,412
	2. Belanja Modal	15,164,000	-	-	-	15,164,000
	Sub Total	25,566,951	3,071,461	-	-	28,638,412
3 Operasional RGM:						
	Belanja Barang dan Jasa	7,800,000	-	-	-	7,800,000
	Belanja Modal	-	-	-	-	-
	Sub Total	7,800,000	-	-	-	7,800,000
4 Operasional Pelaku Lainnya						
	Belanja barang dan jasa	4,500,000	4,607,190	-	-	9,107,190
	Sub Total	4,500,000	4,607,190	-	-	9,107,190
5 Operasional Penetapan Tapal Batas Kampung						
	Belanja barang dan jasa	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	Sub Total	10,000,000	-	-	-	10,000,000
6 Penyelenggaraan Tim perencanaan RKPK						
	Belanja barang dan jasa	5,150,000	-	-	-	5,150,000
	Sub Total	5,150,000	-	-	-	5,150,000
	Jumlah	155,136,951	7,678,651	-	-	162,815,602
ii. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana Kampung :						
	1 Pemeliharaan Lingkungan Kampung			4,000,000		4,000,000
	2 Pembangunan Lanjutan SPAL Mersah Tue			14,335,000		14,335,000
	3 Rabat Beton Lanjutan Jalan Produksi			125,875,000		125,875,000
	4 Pembangunan MCK Geldok			28,841,000		28,841,000
	5 Rabat Beton Lorong Peternakan			71,703,000		71,703,000
	6 Rabat Beton loRONG Aman Pojan			19,056,000		19,056,000

2	1	7		Pembersihan Jalan Kampung		
2	1	7	1	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	APBK
					3,000,000	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	541,288,995	
2	2	1		Pengembangan TPA Al Ikhlas		
2	2	1	1	Belanja Pegawai	13,900,000	APBN
2	2	1	2	Belanja Modal	10,800,000	
					3,100,000	
2	2	2		Pengembangan TPA At Tauhid		
2	2	2	1	Belanja Pegawai	13,400,000	APBN
2	2	2	2	Belanja Modal	10,800,000	
					2,600,000	
2	2	3		Pengembangan Posyandu		
2	2	3	1	Belanja Pegawai	10,800,000	APBN
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
2	2	3	3	Belanja Modal	2,000,000	
					3,400,000	
2	2	4		Pengembangan Sarana Ibadah		
2	2	4	1	Belanja Barang dan jasa	16,890,000	APBK
2	2	4	2	Belanja Modal	3,000,000	
					13,890,000	
2	2	5		Perehapan Pemandian Umum Mersah At-Tauhid		
2	2	5	1	Belanja Barang dan jasa	12,705,600	APBN
2	2	5	2	Belanja Modal	4,326,000	
					8,379,600	
2	2	6		Perehapan MCK Mersah Tue		
2	2	6	1	Belanja Barang dan jasa	13,244,900	APBN
2	2	6	2	Belanja Modal	1,895,000	
					11,349,900	
2	2	7		Pembuatan TPT Jalan At-Tauhid		
2	2	7	1	Belanja Barang dan jasa	20,564,000	APBN
2	2	7	2	Belanja Modal	7,265,000	
					13,299,000	
2	2	8		Rabat Beton Teras TPA dan Menasah At-Tauhid		
2	2	8	1	Belanja Barang dan jasa	12,000,000	APBN
2	2	8	2	Belanja Modal	3,584,200	
					8,415,800	
2	2	9		Pembangunan SPAL Mersah Tue		
2	2	9	1	Belanja Barang dan jasa	14,148,650	APBN
2	2	9	2	Belanja Modal	4,820,000	
					9,328,650	
2	2	10		Pembangunan TPT Mersah Tue		
2	2	10	1	Belanja Barang dan jasa	15,353,800	APBN
					4,940,000	

				2	3	4	PETERANGAN
2	2	10	2	Belanja Modal	10,413,800		
2	2	11		Pemasangan gorong-gorong Mersah Tue	5,965,700		APBN
2	2	11	1	Belanja Barang dan jasa	2,300,000		
2	2	11	2	Belanja Modal	3,665,700		
2	2	12		Perehapan Bak Penampung Air (Intake) Empus Lah	4,098,920		APBN
2	2	12	1	Belanja Barang dan jasa	1,500,000		
2	2	12	2	Belanja Modal	2,598,920		
2	2	13		Pembuatan Pagar Pengaman Kuburan	11,911,650		APBN
2	2	13	1	Belanja Barang dan jasa	4,060,000		
2	2	13	2	Belanja Modal	7,851,650		
2	2	14		Pembangunan Pos Siskamling 2 Unit	20,000,000		APBN
2	2	14	1	Belanja Barang dan jasa	9,375,000		
2	2	14	2	Belanja Modal	10,625,000		
2	2	15		Pembangunan Drainase Jalan Polindes	17,256,350		APBN
2	2	15	1	Belanja Barang dan jasa	6,268,000		
2	2	15	2	Belanja Modal	10,988,350		
2	2	16		Perehapan Pemandian Umum Mersah Geldok	33,520,030		APBN
2	2	16	1	Belanja Barang dan jasa	10,915,000		
2	2	16	2	Belanja Modal	22,605,030		
2	2	17		Pembuatan TPT Belakang TPA Al-Ikhlas Dusun Burbiah	67,987,700		APBN
2	2	17	1	Belanja Barang dan jasa	22,635,000		
2	2	17	2	Belanja Modal	45,352,700		
2	2	18		Pembangunan Rabat Beton Lr Amin Bidin	36,737,700		APBN
2	2	18	1	Belanja Barang dan jasa	10,728,000		
2	2	18	2	Belanja Modal	26,009,700		
2	2	19		Peningkatan Jalan Produksi Dusun Burbiah	200,753,995		APBN
2	2	19	1	Belanja Barang dan jasa	38,489,211		
2	2	19	2	Belanja Modal	162,264,784		